

**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
LUMAJANG**



**Catatan Atas  
Laporan Keuangan**

**2021**

**BAGIAN UMUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

# 1 Pendahuluan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Bagian Umum – Sekretariat Daerah Tahun 2021. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pihak intern Bagian Umum – Sekretariat Daerah. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- (b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- (c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- (e) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- (f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- (g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - (10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - (11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - (17) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  - (18) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - (19) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  - (20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - (21) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (24) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- (25) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- (29) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (30) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- (31) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (32) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (33) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- (34) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- (35) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- (36) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Bab II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja

#### **Bab III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 3.1.1. Pendapatan LRA
  - 3.1.2. Belanja
- 3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
  - 3.1.1. Pendapatan LO
  - 3.1.2. Beban
- 3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
  - 3.1.1. Aset
  - 3.1.2. Kewajiban
  - 3.1.3. Ekuitas
- 3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan yang menggunakan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

**Bab IV. INFORMASI NON KEUANGAN**

**Bab V. PENUTUP**



## 2 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

### 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Bagian Umum – Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 2.1.1. BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Umum meliputi belanja langsung. Belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2-1**  
**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja**  
**Bagian Umum - Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021**

KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.035.769.308,00</b>	<b>14.695.782.589,00</b>	<b>97,74</b>
Belanja Pegawai	8.010.018.339	7.962.858.119,00	98,87
Belanja Barang dan jasa	7.025.750.969,00	6.732.924.470,00	86,52
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.186.903.720,00</b>	<b>965.625.940,00</b>	<b>81,36</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	932.004.040,00	711.568.940,00	76,35
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.899.680,00	254.057.000,00	99,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>16.222.673.028,00</b>	<b>15.661.408.529,00</b>	<b>96,54</b>

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 2-2**  
**Perkembangan Realisasi Belanja Operasi**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017 s.d. 2021**

NO	JENIS BELANJA OPERASI	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Pegawai	265.493.000,00	222.414.000,00	170.123.500,00	8.917.354.001,00	7.962.858.119,00
2	Belanja Barang dan jasa	12.988.437.321,00	12.139.853.338,00	12.875.439.610,00	5.305.881.392,00	6.732.924.470,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.253.930.321,00</b>	<b>12.362.267.338,00</b>	<b>13.045.563.110,00</b>	<b>14.223.235.393,00</b>	<b>14.695.782.589,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai pada tiga tahun terakhir cenderung stabil, sedangkan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 belanja pegawai mengalami penurunan di karenakan gaji dari seluruh pegawai bagian umum sudah tidak melekat pada bagian umum. Pada tahun 2020, dan 2021 gaji seluruh kesekretariatan melekat pada bagian umum sehingga anggaran dan realisasinya naik. Untuk Belanja Barang dan Jasa di tahun 2020 mengalami penurunan dari empat tahun kebelakang karena terdapat pengurangan anggaran dari tim TPAD kabupaten lumajang. Sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan di karenakan adanya penambahan anggaran pada tahun berjalan yaitu pada Perubahan Anggaran.

## 2.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2-3**  
**Realisasi Kinerja Berdasarkan Program Dan Kegiatan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

Program 1	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan 1	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	5.218.857.144,000,00	5.202.301.536,000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 3.887.883.017,000,00

			Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 421.147.914,000,00 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 422.329.900,000,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 148.780.000,000,00 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 279.179.100,000,00 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 10.875.018,000,00 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 60.300,000,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 8.011.595,000,00 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 24.034.692,000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 2.713.867.273,000,00
Belanja Barang & Jasa	-	-	
Belanja Modal	-	-	
Jumlah Sub Kegiatan 1	5.218.857.144,000,00	5.202.301.536,000,00	Sisa Anggaran Sebesar Rp. 47.160.220,000,00
<b>Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>			
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	40.417.380,00	40.417.380,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 37.777.380,00 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 2.640.000,00
Belanja Barang & Jasa	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Jumlah Sub Kegiatan 2	40.417.380,00	40.417.380,00	Sisa Anggaran Sebesar Rp. 0,00

<b>Kegiatan 2</b>	<b>: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
<b>Sub Kegiatan 1</b>	<b>: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	109.910.020,00	76.691.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 18.980.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp. 57.711.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 1</b>	<b>109.910.020,00</b>	<b>76.691.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 33.219.020,00</b>
<b>Kegiatan 3</b>	<b>: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
<b>Sub Kegiatan 1</b>	<b>: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	57.944.590,00	57.873.750,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 57.873.750,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 1</b>	<b>57.944.590,00</b>	<b>57.873.750,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 70.840,00</b>
<b>Sub Kegiatan 2</b>	<b>: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	8.307.750,00	8.268.150,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Makanan dan Minuman Rp. 8.268.150,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 2</b>	<b>8.307.750,00</b>	<b>8.268.150,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 39.600,00</b>
<b>Sub Kegiatan 3</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	419.771.770,00	407.000.220,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 76.472.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 330.528.220,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 3</b>	<b>419.771.770,00</b>	<b>407.000.220,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 12.771.550,00</b>
<b>Sub Kegiatan 4</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>		

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	105.877.800,00	105.710.600,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 105.710.600,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 4</b>	<b>105.877.800,00</b>	<b>105.710.600,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 167.200,00</b>
<b>Sub Kegiatan 5</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	4.500.000,00	2.820.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.820.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 5</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 1.680.000,00</b>
<b>Sub Kegiatan 6</b>	<b>Penyediaan Bahan/Material</b>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	50.091.000,00	36.703.140,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 20.190.720,00 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 0,00 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 4.778.000,00 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 4.328.420,00 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp. 7.406.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 6</b>	<b>50.091.000,00</b>	<b>36.703.140,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 13.387.860,00</b>
<b>Sub Kegiatan 7</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	5.375.940,00	5.375.940,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Honorarium Penanggungjawaban

			Pengelola Keuangan Rp. 5.375.940,00
Belanja Barang & Jasa	947.526.800,00	936.403.900,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 7.011.400,00 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 21.582.000,00 Belanja Natura dan Pakan- Natura Rp. 21.553.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 799.575.500,00 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 1.000.000,00 Belanja Lembur Rp. 85.682.000,00 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp. 0,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 7</b>	<b>952.902.740,00</b>	<b>941.779.840,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 11.122.900,00</b>
<b>Sub Kegiatan 8</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	196.368.100,00	194.047.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 120.835.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 30.831.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 42.381.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 8</b>	<b>196.368.100,00</b>	<b>194.047.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2.321.100,00</b>
<b>Kegiatan 4</b>	<b>: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
<b>Sub Kegiatan 1</b>	<b>: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	-	-	
Belanja Modal	216.021.300,00	198.400.000,00	Realisasi digunakan untuk :

			Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 198.400.000,00
<b>Jumlah Sub Kegiatan 1</b>	<b>216.021.300,00</b>	<b>198.400.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 17.621.300,00</b>
<b>Sub Kegiatan 2</b>	<b>: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	15.568.175,00	15.493.500,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 15.493.500,00
Belanja Modal	516.002.740,00	513.168.940,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 251.038.940,00 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp. 26.730.000,00 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 199.430.000,00 Belanja Modal Personal Computer Rp. 35.970.000,00
<b>Jumlah Sub Kegiatan 2</b>	<b>531.570.915,00</b>	<b>528.662.440,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2.908.475,00</b>
<b>Kegiatan 5</b>	<b>: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
<b>Sub Kegiatan 1</b>	<b>: Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	109.587.000,00	100.324.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 3.291.000,00 Belanja Lembur Rp. 97.033.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 1</b>	<b>109.587.000,00</b>	<b>100.324.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 9.263.000,00</b>
<b>Sub Kegiatan 2</b>	<b>: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	1.044.607.500,00	959.849.779,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Tagihan Telepon Rp. 12.824.300,00 Belanja Tagihan Air Rp. 70.614.200,00 Belanja Tagihan Listrik Rp. 712.206.818,00

			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 164.204.461,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 2</b>	<b>1.044.607.500,00</b>	<b>959.849.779,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 84.757.721,00</b>
<b>Sub Kegiatan 3</b>	<b>: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	35.275.000,00	28.580.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp. 28.580.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 3</b>	<b>35.275.000,00</b>	<b>28.580.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 6.695.000,00</b>
<b>Sub Kegiatan 4</b>	<b>: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	1.111.980.000,00	1.099.511.208,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp. 162.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 489.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 376.210.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 1.200.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 64.226.520,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 6.274.688,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 4</b>	<b>1.111.980.000,00</b>	<b>1.099.511.208,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 12.468.792,00</b>
<b>Kegiatan 6</b>	<b>: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
<b>Sub Kegiatan 1</b>	<b>: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	103.500.000,00	98.238.450,00	Realisasi digunakan untuk :



			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 98.238.450,00
Belanja Modal	-	-	
Jumlah Sub Kegiatan 1	103.500.000,00	98.238.450,00	Sisa Anggaran Sebesar Rp. 5.261.550,00
Sub Kegiatan 2	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	895.990,00	895.990,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 895.990,00
Belanja Barang & Jasa	719.879.000,00	698.648.038,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 226.590.000,00 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 325.082.438,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 21.999.800,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp. 15.986.800,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 13.983.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 5.006.000,00
Belanja Modal	199.980.000,00	-	

Jumlah Sub Kegiatan 2	920.754.990,00	699.544.028,00	Sisa Anggaran Sebesar Rp. 221.210.962,00
Sub Kegiatan 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	119.310.000,00	112.295.000,00	<p>Realisasi digunakan untuk :</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp. 18.240.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Rp. 3.348.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan) Rp. 5.460.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 12.651.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp. 2.175.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 32.236.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Rp. 505.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 18.155.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 6.825.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan</p>

			Personal Computer Rp. 12.700.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 3</b>	<b>119.310.000,00</b>	<b>112.295.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 7.015.000,00</b>
<b>Sub Kegiatan 4</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	508.218.734,00	506.773.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp. 23.805.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp. 14.275.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 468.693.000,00
Belanja Modal	254.899.680,00	254.057.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 254.057.000,00
<b>Jumlah Sub Kegiatan 4</b>	<b>763.118.414,00</b>	<b>760.830.000,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2.288.414,00</b>
<b>Kegiatan 7</b>	<b>: Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		
<b>Sub Kegiatan 1</b>	<b>: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	855.647.890,00	812.948.665,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 5.016.000,00 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 40.346.240,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 25.469.180,00 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 402.230.835,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 264.653.910,00 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp. 72.000.000,00

			Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 2.632.500,00 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 600.000,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 1</b>	<b>855.647.890,00</b>	<b>812.948.665,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 42.699.225,00</b>
<b>Sub Kegiatan 2</b>	<b>: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	448.911.960,00	422.779.955,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 0,00 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 30.100.070,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 22.051.370,00 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 252.416.015,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 82.212.500,00 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp. 36.000.000,00 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 0,00
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Sub Kegiatan 2</b>	<b>448.911.960,00</b>	<b>422.779.955,00</b>	<b>Sisa Anggaran Sebesar Rp. 26.132.005,00</b>
<b>Sub Kegiatan 3</b>	<b>: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>		
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	52.967.880,00	51.965.115,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 27.764.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 20.449.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 65.000,00 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 3.687.115,00

Belanja Modal	-	-	
Jumlah Sub Kegiatan 3	52.967.880,00	51.965.115,00	Sisa Anggaran Sebesar Rp. 1.002.765,00

### 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Umum selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2-4**  
**Perkembangan Posisi Keuangan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Per 31 Desember 2017 s.d. 2021**

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
4. Aset	33.983.552.63 0,89	34.409.039.895, 35	31.054.396.420, 35	16.473.155.210, 66	25.284.235.753, 61
5. Kewajiban	94.903.657,00	192.727.349,00	250.170.192,00	320.155.179,00	353.740.365,00
6. Ekuitas	7.187.794.963, 75	34.216.312.546, 35	30.804.226.228, 35	16.153.000.031, 66	16.258.188.448, 71
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	33.983.552.63 0,88	34.409.039.895, 35	31.054.396.420, 35	16.473.155.210, 66	16.611.928.813, 71

### 2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada tahun 2021, kinerja keuangan di sektor belanja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tidak mengalami kendala yang berarti sehingga realisasi anggaran belanja dapat dioptimalkan.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

#### **2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum sudah memenuhi kriteria khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

#### **2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah**

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

#### **2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern**

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

# 3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

## 3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

### 3.1.1. BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Daerah	16.222.673.028,00	15.661.408.529,00	15.351.239.368,00

Sebagaimana terlihat belanja Bagian Umum – Setda Lumajang di dalam APBD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 16.222.673.028,00. Realisasi belanja mencapai 96,54 atau sebesar Rp. 15.661.408.529,00. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja mencapai 15,18%.

### 1. BELANJA OPERASI

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Operasi	15.035.769.308,00	14.695.782.589,00	14.223.235.393,00

Belanja operasi pada Bagian Umum terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 3 - 1**  
**Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	8.010.018.339,00	7.962.858.119,00	99,41	8.917.354.001,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.025.750.969,00	6.732.924.470,00	95,83	5.305.881.392,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.035.769.308,00</b>	<b>14.695.782.589,00</b>	<b>97,74</b>	<b>14.223.235.393,00</b>

**a. Belanja Pegawai** **Rp. 7.962.858.119,00**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	8.010.018.339,00	7.962.858.119,00	8.917.354.001,00

Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan seluruh ASN pada lingkup Sekretariat Daerah dan belanja honorarium pegawai pada Bagian Umum. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

**Tabel 3 - 2**  
**Realisasi Belanja Pegawai**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.899.339.323,00	3.887.883.017,00	99,71	4.386.193.147,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	424.721.632,00	421.147.914,00	99,16	466.294.198,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	422.429.902,00	422.329.900,00	99,98	447.495.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	149.280.009,00	148.780.000,00	99,67	168.060.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	279.667.300,00	279.179.100,00	99,83	264.839.940,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.102.170,00	10.875.018,00	97,95	9.827.253,00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.392,00	60.300,00	90,82	62.155,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.072.669,00	8.011.595,00	99,24	9.012.559,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.177.747,00	24.034.692,00	99,41	27.142.209,00



No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.744.471.885,00	2.723.707.823,00	98,88	3.004.544.540,00
11	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.049.310,00	44.049.310,00	100,00	76.338.000,00
12	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	57.545.000,00
	<b>Jumah Belanja Pegawai</b>	<b>8.010.018.339,00</b>	<b>7.962.858.119,00</b>	<b>99,41</b>	<b>8.917.354.001,00</b>

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 6.732.924.470,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	7.025.750.969,00	6.732.924.470,00	5.305.881.392,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3 - 3

Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
Tahun 2021 dan 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	3.200.491.235,00	3.069.152.960,00	1.620.681.752,00
2	Belanja Jasa	2.667.381.500,00	2.512.409.022,00	1.754.552.457,00
3	Belanja Pemeliharaan	1.084.010.134,00	1.068.690.488,00	383.291.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	73.868.100,00	73.212.000,00	551.404.184,00
5	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.025.750.969,00</b>	<b>6.723.464.470,00</b>	<b>5.305.881.392,00</b>

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan

dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 3.069.152.960,00 terinci sebagai berikut.

**Tabel 3 – 4**  
**Realisasi Belanja Persediaan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.937.600,00	112.722.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	126.032.720,00	125.843.300,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	343.273.370,00	330.528.220,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.300.000,00	3.291.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.875.925,00	23.761.650,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.770.020,00	18.980.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	268.613.400,00	246.780.720,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	174.861.720,00	174.682.310,00
9	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	34.400.000,00	5.016.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.148.470.000,00	1.146.441.910,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.500.000,00	120.835.000,00
12	Belanja Natura dan Pakan-Natura	702.516.480,00	680.977.850,00
13	Belanja Pakaian Adat Daerah	63.140.000,00	57.711.000,00
14	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.800.000,00	21.582.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.200.491.235,00</b>	<b>3.069.152.960,00</b>

## (2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.512.409.022, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3 – 5**  
**Realisasi Belanja Jasa**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	6.960.920,00
2	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	1.865.000,00
3	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.450.000,00	1.000.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	489.600.000,00	438.000.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00	108.000.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	378.000.000,00	371.710.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	162.000.000,00	218.100.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Supir	90.000.000,00	90.000.000,00
9	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	164.560.000,00	164.204.461,00
10	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	2.820.000,00
11	Belanja Lembur	191.969.000,00	182.715.000,00
12	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	3.687.115,00
13	Belanja Tagihan Air	75.600.000,00	70.614.200,00
14	Belanja Tagihan Listrik	786.000.000,00	712.206.818,00
15	Belanja Tagihan Telepon	18.447.500,00	12.824.300,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.580.000,00	6.274.688,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72.600.000,00	64.226.520,00
18	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.275.000,00	28.580.000,00
19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	14.400.000,00	14.275.000,00
20	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	24.000.000,00	14.345.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.667.381.500,00</b>	<b>2.512.409.022,00</b>

**(3) Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 1.068.690.488 terinci sebagai berikut.

**Tabel 3 – 6**  
**Realisasi Belanja Pemeliharaan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	15.986.800,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.000.000,00	13.983.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.500.000,00	5.006.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.000.000,00	21.999.800,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	428.600.000,00	423.320.888,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	27.881.400,00	25.646.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	3.348.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.850.000,00	12.651.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.500.000,00	5.460.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.500.000,00	505.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.200.000,00	2.175.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.200.000,00	32.236.000,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.970.000,00	6.825.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.200.000,00	18.155.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.790.000,00	12.700.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	469.818.734,00	468.693.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.084.010.134,00</b>	<b>1.068.690.488,00</b>

**(4) Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 73.212.000,00 terinci sebagai berikut.

**Tabel 3 – 7**  
**Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.858.100,00	30.831.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.010.000,00	42.381.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>73.868.100,00</b>	<b>73.212.000,00</b>

**(5) Belanja Lainnya**

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp 0,00 terinci sebagai berikut.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
<b>2. Belanja Modal</b>			<b><u>Rp. 975.085.940,00</u></b>
Belanja Modal	<u>1.186.903.720,00</u>	<u>975.085.940,00</u>	<u>1.128.003.975,00</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3 - 8**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	932.004.040,00	711.568.940,00	76,35	932.668.975,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.899.680,00	254.057.000,00	99,67	195.335.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	1.186.903.720,00	965.625.940,00	81,36	1.128.003.975,00

**a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antalin biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**Tabel 3 – 9**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	216.021.300,00	198.400.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	199.980.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	252.942.800,00	251.038.940,00
4	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.225.000,00	26.730.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	199.650.000,00	199.430.000,00
6	Belanja Modal Personal Computer	36.184.940,00	35.970.000,00
	Jumlah	932.004.040,00	711.568.940,00

### b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

**Tabel 3 – 10**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No.	Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	254.899.680,00	254.057.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>254.899.680,00</b>	<b>254.057.000,00</b>

## 3.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

### 1. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

**Tabel 3 – 11**  
**Rincian Aset Lancar**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00
Kas lainnya	0,00	0,00
Piutang pajak	0,00	0,00
Piutang retribusi	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	707.628.504,00	692.754.247,00
<b>Jumlah</b>	<b>707.628.504,00</b>	<b>692.754.247,00</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3 – 12**  
**Mutasi kas di bendahara pengeluaran**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

(1) Saldo 31 Desember 2020		0,00
(2) Penerimaan :		
•SP2D UP	240.000.000,00	
•SP2D TUP	345.370.000,00	
•Penerimaan PFK	0,00	
Jumlah Penerimaan		585.370.000,00
(3) Pengeluaran :		
•SPJ TU Nihil	179.001.750,00	
•SPJ GU Nihil	180.466.560,00	
•Setor kembali sisa TUP	166.368.250,00	
•Setor kembali sisa UP/GU	59.533.440,00	
•Pengeluaran PFK	0,00	
•Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0,00	
Jumlah pengeluaran		585.370.000,00
(4) Saldo 31 Desember 2021		0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) Piutang Lainnya	0,00	0,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00** terinci sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
3) Persediaan	707.628.504,00	692.754.247,00



Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

**Tabel 3 – 13**  
**Laporan Persediaan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		692.754.247,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		+/- 0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		692.754.247,00
<b>4</b>	<b>Ditambah :</b>		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	3.069.152.960,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Belanja Persediaan BOS	0,00	
8	Penerimaan hibah/mutasi persediaan	48.672.600,00	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	3.117.825.560,00	
<b>10</b>	<b>Dikurangi :</b>		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020	0,00	
12	Pengeluaran hibah/mutasi persediaan	265.014.496,00	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	265.014.496,00	0,00
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		3.545.565.311,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(2.837.936.807,00)
<b>16</b>	<b>Persediaan tahun 2021 (14+15)</b>		<b>707.628.504,00</b>

Pada tahun 2021 mutasi keluar persediaan ke semua bagian pada lingkup sekretariat daerah sebesar Rp. 265.014.496,00, berikut rinciannya :

- 1) Mutasi ke Bagian Protokol & TU Pimpinan sebesar Rp. 57.809.376,00 : ATK sebesar Rp 42.558.624,00, Cetakan sebesar Rp. 15.250.752,00,
- 2) Mutasi ke Bagian LPBJ sebesar Rp. 48.289.904,00 : ATK sebesar Rp 42.890.084,00, Cetakan sebesar Rp. 5.399.820,00.
- 3) Mutasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 35.371.234,00 : ATK sebesar Rp 29.676.144,00, Cetakan sebesar Rp. 5.695.090,00.
- 4) Mutasi ke Bagian Pemerintahan sebesar Rp. 35.709.728,00 : ATK sebesar Rp 31.542.928,00, Cetakan sebesar Rp. 4.166.800,00.
- 5) Mutasi ke Bagian ESDA & Perekonomian sebesar Rp. 22.719.897,00 : ATK sebesar Rp 18.553.097,00, Cetakan sebesar Rp. 4.166.800,00.
- 6) Mutasi ke Bagian Hukum sebesar Rp. 56.330.494,00 : ATK sebesar Rp 49.735.994,00, Cetakan sebesar Rp. 6.594.500,00.

- 7) Mutasi ke Bagian Organisasi sebesar Rp. 20.658.863,00 : ATK sebesar Rp 20.292.063,00, Cetakan sebesar Rp. 366.800,00.

Pada tahun 2021 mutasi masuk persediaan dari semua bagian pada lingkup sekretariat daerah sebesar Rp. 48.672.600,00, berikut rinciannya :

- 1) Mutasi ke Bagian Protokol & TU Pimpinan sebesar Rp. 48.672.600,00 : Alat Listrik sebesar Rp 27.679.800,00, Bahan Lainnya (Kebersihan) sebesar Rp. 20.157.800,00, dan Bahan Natura (Bahan Makanan) sebesar Rp. 835.000,.

**Tabel 3 – 14**  
**Daftar Persediaan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	358.342.834,00	320.466.025,00
2	Persediaan Barang cetakan	125.805.365,00	137.094.452,00
3	Persediaan Material/Bahan	0,00	0,00
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
5	Persediaan Perabot Kantor	9.878.000,00	40.645.000,00
6	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0,00	0,00
7	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
8	Persediaan Obat-obatan	0,00	0,00
9	Persediaan Bahan Kimia	0,00	0,00
10	Persediaan bahan praktek kegiatan	0,00	0,00
11	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	0,00	0,00
12	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan	0,00	0,00
13	Persediaan Perangko	0,00	0,00
14	Persediaan Bahan Natura	8.693.975,00	0,00
15	Persediaan Bahan Lainnya	75.052.000,00	75.973.470,00
16	Persediaan Alat Listrik	129.856.330,00	118.575.300,00
17	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	0,00	0,00
18	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	0,00	0,00
19	Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00
20	Alat Peraga dan Mainan	0,00	0,00
21	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>707.628.504,00</b>	<b>692.754.247,00</b>

#### **b. ASET TETAP**

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>58.021.628.877,15</b>	<b>34.807.165.789,76</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik

Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

**Tabel 3 – 15**  
**Daftar Mutasi Aset Tetap**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	1.108.112.267,00		1.425.144.000,00	-	2.533.256.267,00
2	Peralatan dan Mesin	21.913.540.742,00		9.182.421.704,00	1.523.967.000,00	29.796.995.446,00
3	Gedung dan Bangunan	11.381.382.880,76		13.560.538.883,39	-	24.941.921.764,15
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	397.254.900,00		285.200.000,00	-	682.454.900,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.875.000,00		60.125.500,00	-	67.000.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-	-	-
	Jumlah	34.807.165.789,76		24.513.430.087,39	1.523.967.000,00	57.796.628.877,15

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 24.738.430.087,39 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 965.625.940,00;
  - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 0,00;

- (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0,00;
  - (4) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 0,00;
  - (5) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0.00;
  - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp 0,00;
  - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0,00;
  - (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 23.772.804.147,39;
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 1.523.967.000,00 meliputi:
- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 26.450.000,00;
  - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0.00;
  - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp 0,00;
  - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp 0,00; dan
  - (5) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 1.497.517.000,00;
- c) Lain – Lain sebesar Rp 0,00;

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	2.533.256.267,00	1.108.112.267,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.533.256.267,00 dan Rp 1.108.112.267,00, terinci sebagai berikut :

**Tabel 3 – 16**  
**Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2021**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Korek si	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	1.108.112.267,00		1.425.144.000,00	-	2.533.256.267,00
	Jumlah	1.108.112.267,00		1.425.144.000,00	-	2.533.256.267,00

Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah diperoleh dari mutasi dari SKPD lain. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebagai berikut:

- a. Penambahan tanah sebesar Rp. 1.425.144.000,00 meliputi :
  - Penambahan mutasi masuk dari Bagian Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 1.425.144.000,00;

b. Pengurangan tanah sebesar Rp. 0,00 sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	29.796.995.446,00	21.913.540.742,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 29.796.995.446,00 dan Rp 21.913.540.742,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 3 – 17  
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Besar	1.239.521.075,00		326.758.600,00		1.566.279.675,00
2	Alat Angkutan	12.062.733.477,00		2.913.067.350,00	1.432.370.000,00	13.318.430.827,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0,00		-	-	0,00
4	Alat Pertanian	0,00		-	-	0,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	5.790.354.560,00		5.493.224.854,00	41.060.000,00	11.216.669.414,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.122.803.750,00		458.960.000,00	-	1.607.613.750,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00		58.700.000,00	-	58.700.000,00
8	Alat Laboratorium	0,00		-	-	0,00
9	Alat Persenjataan	0,00		-	-	0,00
10	Komputer	1.132.719.680,00		156.710.900,00	42.537.000,00	1.246.893.580,00
11	Alat Eksplorasi	0,00		-	-	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00		-	-	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00		-	-	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00		-	-	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	565.408.200,00			8.000.000,00	557.408.200,00
16	Alat Peraga	0,00		-	-	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00		-	-	0,00
18	Rambu - Rambu	0,00		-	-	0,00
19	Peralatan Olah Raga	0,00		-	-	0,00
	Jumlah	21.913.540.742,00		9.407.421.704,00	1.523.967.000,00	29.571.995.446,00

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari belanja modal dan mutasi dari SKPD lain. Rincian penambahan aset tetap sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Alat-Alat Bantu :
  - Belanja modal pompa Rp. 0,00
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor :

- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 198.400.000,00
- Belanja modal kendaraan bermotor perorangan Rp. 00,0
- c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga :
  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 251.038.940,00
  - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 26.730.000,00
- d. Belanja Modal Komputer :
  - Belanja Modal Personal Computer Rp. 35.970.000,00
- e. Belanja Modal Alat Studio :
  - Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 199.430.000,00
- f. Penambahan Mutasi dari Skpd Lain sebagai berikut :
  - Mutasi Alat Besar dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 326.758.600,00
  - Mutasi Alat-Alat Angkutan dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 718.141.850,00
  - Mutasi Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 5.159.770.914,00
  - Mutasi Alat-Alat Studio Dan Komunikasi dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 259.530.000,00
  - Mutasi Alat-Alat Kedokteran dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 58.700.000,00
  - Mutasi KOMPUTER dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 120.740.900,00
  - Mutasi 3 unit Sepeda Motor dari Bag. Organisasi sebesar Rp. 41.340.500,00
  - Mutasi 4 unit Mobil dari BPKD sebesar Rp. 1.730.185.000,00
  - Mutasi Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga dari Diskominfo sebesar Rp. 55.685.000,00
  - Mutasi 4 unit Mobil dari BPKD sebesar Rp. 225.000.000,00.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari mutasi ke SKPD lain dan penghapusan. Rincian pengurangan aset tetap sebagai berikut :

- a. Alat-alat Angkutan :
  - Mutasi 1 unit Mobil Dinas ke DPMD sebesar Rp. 469.000.000,00
  - Mutasi 1 unit Sepeda Motor ke Dinkes sebesar Rp. 18.900.000,00
  - Mutasi 2 unit Mobil Dinas ke Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 822.870.000,00

- Mutasi 4 unit Sepeda Motor ke Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 121.600.000,00
- b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga :
  - Mutasi 3 unit Meja Staf ke Stpol PP sebesar Rp. 1.500.000,00
- c. Komputer :
  - Mutasi 2 unit Komputer ke Bag. BPBJ sebesar Rp. 20.823.000,00.
  - Mutasi 3 unit Komputer ke Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 16.786.000,00.
  - Mutasi 2 unit Komputer ke Bag. Tapem sebesar Rp. 18.038.000,00.
- d. Alat Keselamatan Kerja :
  - Mutasi 2 unit Tenda ke BPBD sebesar Rp. 8.000.000,00.
- e. Penghapusan aset tetap berdasarkan SK no 188/77/427.12/2021 tanggal 10-12-2021 sebesar Rp. 26.450.000,00.

Pada Catatan 2020 terdapat pinjam pakai kendaraan dinas terdiri dari 1 truck dan 4 kendaraan roda 4 (empat). Proses pengadaan 1 kendaraan truck dan 4 kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang ada pada bag. Umum telah dilaksanakan yang rencananya untuk dipinjam pakaikan kepada instansi vertikal yaitu Kejaksaan Negeri Lumajang, Kodim 0821 Lumajang, Polres Lumajang, dan Pengadilan Negeri Lumajang dan setiap tahun anggaran baru selalu di perbaharui untuk surat pinjam pakainya.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	24.941.921.764,15	11.381.382.880,76

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3 – 18  
 Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
 Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
 Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	11.381.382.880,76		12.883.074.083,39	-	24.264.456.964,15
2	Monumen	-	-	677.464.800,00	-	677.464.800,00
	Jumlah	11.381.382.880,76		13.560.538.883,39	-	24.941.921.764,15

Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan diperoleh dari belanja modal dan mutasi dari SKPD lain. Rincian penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- a. Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp13.560.538.883,39 meliputi:
  - Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 254.057.000,00;
  - Mutasi Masuk dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 13.306.481.883,39
- b. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	682.454.900,00	397.254.900,00

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Bagian Umum terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3 – 19  
Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis	Saldo 31 Desember2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember2021
1	Jalan Dan Jembatan	-		-	-	-
3	Bangunan Air	0,00		285.200.000,00	-	285.200.000,00
4	Instalasi	319.561.900,00		-	-	319.561.900,00
5	Jaringan	77.693.000,00		-	-	77.693.000,00
	Jumlah	397.254.900,00		-	-	682.454.900,00

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan diperoleh dari mutasi ke SKPD lain. Rincian penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebagai berikut :

- a. Penambahan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 285.200.000,00 sebagai berikut :
  - Penambahan karena Mutasi Masuk dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 285.200.000,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	67.000.500,00	6.875.000,00



Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 67.000.500,00 dan Rp 6.875.000,00. Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel 3 – 20**  
**Daftar Mutasi Aset Aset Tetap Lainnya**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga"	6.875.000,00	-	31.500.000,00	-	31.500.000,00
3	Hewan	-	-	-	-	-
4	Biota Perairan	-	-	-	-	-
5	Tanaman	-	-	28.625.500,00	-	28.625.500,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.125.500,00</b>	<b>-</b>	<b>67.000.500,00</b>

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan diperoleh dari mutasi ke SKPD lain. Rincian penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebagai berikut :

- a. Penambahan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 60.125.500,00 sebagai berikut :
  - Penambahan karena Mutasi Masuk dari Bag. Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 60.125.500,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f) <b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Dalam Tahun 2021 dan seterusnya Aset Tetap KDP sudah tidak mempunyai nilai.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(g) <b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>19.536.272.799,05</b>	<b>30.571.698.756,75</b>

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 19.536.272.799,05 dan Rp 30.571.698.756,75. Jumlah Akumulasi Penyusutan sebagai berikut.

**Tabel 3 – 21**  
**Daftar Akumulasi Penyusutan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis	31 Des 2020	31 Des 2021
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>16.053.981.166,27</b>	<b>24.696.567.098,54</b>
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar	955.660.934,39	1.325.150.268,78
2	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Angkut	7.667.766.641,88	10.167.851.757,76
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.223.184.780,00	10.409.382.222,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	704.878.150,00	1.079.119.550,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kedokteran	0,00	46.960.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Komputer	1.025.352.180,00	1.169.541.580,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	477.138.480,00	498.561.720,00
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>3.390.966.955,28</b>	<b>8.974.150.869,00</b>
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	3.390.966.955,28	8.933.502.981,00
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	0,00	40.647.888,00
	<b>JALAN, IIRIGASI &amp; JARINGAN</b>	<b>91.324.677,50</b>	<b>164.000.050,00</b>
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	0,00	62.744.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Instalasi	71.901.427,50	79.890.475,00
3	Akumulasi Penyusutan Jaringan	19.423.250,00	21.365.575,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.536.272.799,05</b>	<b>33.834.718.017,54</b>

Pada berita acara akumulasi penyusutan terdapat mutasi masuk sebesar Rp. 12.316.459.032,30 dan keluar sebesar Rp. 746.338.250,00 dimana di peroleh dari mutasi aset tetap sehingga akumulasinya ikut serta di mutasi.

**c. ASET LAINNYA**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Lainnya	614.696.390,00	614.696.390,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 614.696.390,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 614.696.390,00 terinci sebagai berikut :

**Tabel 3 – 22**  
**Daftar Rincian Aset lainnya**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021**

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Aset Tak Berwujud				
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				
4	Aset Lain lain	614.696.390,00			614.696.390,00
	<b>Jumlah</b>	<b>614.696.390,00</b>			<b>614.696.390,00</b>

**d. KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban bagian umum per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 353.740.365,000,00 dan Rp 320.155.179,000,00 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	353.740.365,000,00	320.155.179,000,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing

sebesar Rp 353.740.365,000,00 dan Rp 250.170.192,00. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang belanja.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Utang Belanja	353.740.365,000,00	320.155.179,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 353.740.365,000,00 terdiri dari utang belanja pegawai dan utang belanja jasa, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3 – 23  
Rincian Utang  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja Pegawai	239.794.408,00	253.844.559,00	239.794.408,00	253.844.559,00
2	Utang Belanja Jasa	250.170.192,00	99.895.806,00	250.170.192,00	99.895.806,00
	Jumlah	320.155.179,00	353.740.365,00	320.155.179,00	353.740.365,00

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 253.844.559,00 merupakan Tambahan Penghasilan PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3 – 24  
Rincian Utang Belanja Pegawai  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2020	31 Des 2021
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	432.900,00	0,00	432.900,00	0,00
2	Tunjangan keluarga	60.606,00	0,00	60.606,00	0,00
3	Pembulatan gaji	9,00	0,00	9,00	0,00
4	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
5	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP)	238.339.032,00	253.844.559,00	238.339.032,00	253.844.559,00
	Jumlah	239.794.408,00	253.844.559,00	239.794.408,00	253.844.559,00

Saldo utang belanja jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp 99.895.806,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon/Internet, air PDAM, dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

**Tabel 3 – 25**  
**Rincian Utang Belanja Jasa**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2020	31 Des 2021
1	Jasa listrik	60.683.372,00	69.943.430,00	60.683.372,00	69.943.430,00
2	Jasa telepon	1.351.945,00	728.175,00	1.351.945,00	728.175,00
3	PDAM	6.282.100,00	6.024.700,00	6.282.100,00	6.024.700,00
4	Utang Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	11.875.000,00	0,00	11.875.000,00
5	Utang Belanja Kawat/Faksimile/Internet	12.043.354,00	11.324.501,00	12.043.354,00	11.324.501,00
	<b>Jumlah</b>	80.360.771,00	99.895.806,00	80.360.771,00	99.895.806,00

**e. EKUITAS**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>1) Ekuitas</b>	<b>25.155.495.388,61</b>	<b>16.258.188.448,71</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3 – 26**  
**Daftar Ekuitas**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	25.284.235.753,61	16.578.343.627,71
2	Jumlah Kewajiban	353.740.365,00	320.155.179,00
3	Ekuitas (1(2))	25.155.495.388,61	16.258.188.448,71

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

**Tabel 3 – 27**  
**Daftar Rincian Ekuitas**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	16.258.188.448,71	30.804.226.228,35
2	Surplus (Defisit) LO	(17.214.546.058,19)	(17.071.446.995,14)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	0,00	2.525.964.724,50
4	EKUITAS AKHIR	25.155.495.388,61	16.258.188.448,71

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

### 3.3.PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

#### a. BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	7.976.908.270,00	8.880.491.358,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Bagian Umum tahun 2021 dan 2020 yang berasal dari belanja langsung, sebagai berikut.

**Tabel 3 – 28**  
**Daftar Perhitungan Beban Pegawai**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	2021	2020
Belanja Pegawai LRA	7.962.858.119,00	8.640.696.950,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai Lo</b>	<b>7.962.858.119,00</b>	<b>8.640.696.950,00</b>

**Tabel 3 – 29**  
**Daftar Rincian Beban Pegawai**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Jenis Beban Pegawai	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Gaji pokok PNS	3.887.450.117,00	4.385.529.847,00
2	Tunjangan keluarga	421.087.308,00	466.242.772,00
3	Tunjangan jabatan	422.329.900,00	444.775.000,00
4	Tunjangan fungsional umum	148.780.000,00	168.060.000,00
5	Tunjangan beras	279.179.100,00	264.839.940,00
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	10.875.018,00	9.800.653,00
7	Pembulatan gaji	60.291,00	62.024,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.010.554,00	36.148.406,00
9	Iuran Jaminan Jaminan Kematian	24.031.575,00	
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	2.728.415.097,00	2.971.149.716,00
11	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.049.310,00	
12	Honorarium pengadaan barang/jasa	2.640.000,00	8.814.000,00
13	Honorarium penyimpan dan pengurus barang	-	7.308.000,00
14	Honorarium penerima hasil pekerjaan	-	1.200.000,00
15	Honorarium pengguna anggaran	-	20.640.000,00
16	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	-	18.900.000,00
17	Honorarium bendahara	-	6.672.000,00
18	Honorarium PPK-SKPD (verifikator)	-	8.004.000,00
19	Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi	-	4.800.000,00
20	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	-	0,00
21	Uang lembur PNS	-	57.545.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.976.908.270,00</b>	<b>170.123.500,00</b>

Rincian Beban Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gaji pokok PNS sebesar Rp. 3.887.450.117,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 3.887.883.017,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 432.900,00.
2. Tunjangan keluarga sebesar Rp. 421.087.308,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 421.147.914,00 (-) beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 60.606,00.
3. Tunjangan jabatan sebesar Rp. 422.329.900,00 sudah sesuai dengan LRA.
4. Tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 148.780.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
5. Tunjangan beras sebesar Rp. 279.179.100,00 sudah sesuai dengan LRA.
6. Tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp. 10.875.018,00 sudah sesuai dengan LRA.

7. Pembulatan gaji sebesar Rp. 60.291,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 60.300,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 9,00.
8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 8.010.554,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 8.011.595,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 1.041,00.
9. Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp. 24.031.575,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 24.034.692,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 3.117,00.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 2.728.415.097,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 2.713.867.273,00 ditambah beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 253.844.559,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2021 sebesar Rp. 239.296.735,00.
11. Honorarium Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp. 44.049.310,00 sudah sesuai dengan LRA.
12. Honorarium pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 2.640.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>2) Beban Barang dan Jasa-LO</b>	<b>6.509.313.352,00</b>	<b>5.363.176.170,00</b>

Beban barang dan jasa yang menjadi beban bagian umum meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3 – 30**  
**Daftar Perhitungan Beban Barang dan Jasa**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021**

No	Beban Barang dan Jasa		
1	Persediaan Awal 1 Januari 2021	1.693.996.560,00	
2	Belanja Barang dan Jasa	6.732.924.470,00	
3	Utang Belanja yang menambah beban	99.895.806,00	
4	Koreksi Persediaan	0,00	
5	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00	



No	Beban Barang dan Jasa		
6	Dst.....		(+)
	<b>Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia</b>		<b>8.526.816.836,00</b>
7	Persediaan Akhir 31 Desember 2021		707.628.504,00
8	Mutasi Barang Keluar		525.391.458,00
9	Utang Belanja Barang Jasa yang menambah beban tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2020		80.360.771,00
10	Koreksi Persediaan Lebih Catat		0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Beban</b>	(-)	<b>1.271.830.747,00</b>
	<b>Beban Barang/Jasa - LO</b>		<b>6.509.313.352,00</b>

Tabel 3 – 31  
Daftar Beban Barang dan Jasa  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	2.837.936.807,00	1.693.996.560,00
2	Beban Jasa	2.529.474.057,00	1.742.287.936,00
3	Beban Pemeliharaan	1.068.690.488,00	1.376.442.999,00
4	Beban Perjalanan Dinas	73.212.000,00	551.004.184,00
5	Beban Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.509.313.352,00</b>	<b>5.363.731.679,00</b>

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Beban Persediaan	4.149.353.892,00	4.149.353.892,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

Tabel 3 – 32  
Daftar Rincian Beban Persediaan  
Bagian Umum – Sekretariat Daerah  
per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	2021	2020
1. Belanja Persediaan LRA	3.069.152.960,00	1.620.681.752,00
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	1.693.996.560,00	1.249.320.263,00
3. Koreksi persediaan awal	0,00	0,00
4. Hibah persediaan dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00

Keterangan	2021	2020
5. Reklasifikasi Belanja Modal menambah persediaan	0,00	0,00
6. Koreksi persd.	0,00	0,00
7. Beban persediaan 2020 yang masih harus di bayar	0,00	0,00
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)	1.693.996.560,00	1.249.320.263,00
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)	4.763.149.520,00	2.870.002.015,00
Dikurangi		
10. Utang beban persediaan tidak menambah persediaan	0,00	0,00
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	(707.628.504,00)	(692.754.247,00)
12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
13. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah	0,00	0,00
14. Penerimaan hibah	(48.672.600,00)	0,00
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu	(0,00)	(0,00)
16. Mutasi persediaan ke luar	(525.391.458,00)	(525.391.458,00)
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)	(1.218.145.705,00)	(1.218.145.705,00)
18. Beban Persediaan (9(17)	<b>2.837.936.807,00</b>	<b>1.693.996.560,00</b>

**Tabel 3 – 33**  
**Daftar Rincian Beban Persediaan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Beban Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	246.780.720,00	277.908.888,00
2	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	5.016.000,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	195.761.580,00	153.134.665,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.402.477,00	56.935.950,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	82.370.525,00	224.734.030,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.291.000,00	1.800.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	54.528.650,00	14.397.030,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	142.242.070,00	109.793.648,00

No.	Beban Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.980.000,00	0,00
10	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.582.000,00	0,00
11	Beban Natura dan Pakan-Natura	673.118.875,00	6.362.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	120.835.000,00	163.643.000,00
13	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.158.316.910,00	928.167.500,00
14	Beban Pakaian Adat Daerah	57.711.000,00	0,00
	<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>2.837.936.807,00</b>	<b>1.693.996.560,00</b>

Rincian Beban Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 57.402.477,00 - diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal ATK tahun 2021 sebesar Rp. 320.466.025,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 330.528.220,00 dikurangi (-) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 358.342.834,00 di kurangi (-) pengeluaran sebesar Rp. 235.248.934,00.
2. Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp. 142.242.070,00 - diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Alat Listrik tahun 2020 sebesar Rp 118.575.300,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp. 125.843.300,00 ditambah (+) Mutasi Masuk dari bag Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 27.679.800,00 dikurangi (-) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 129.856.330,00
3. Beban Persediaan Cetakan sebesar Rp. 82.370.525,00 - diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Cetakan tahun 2020 sebesar Rp 137.094.452,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp. 112.722.000,00 dikurangi (-) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 125.805.365,00 di kurangi (-) pengeluaran sebesar Rp. 41.640.562,00.
4. Beban Beban Persediaan Perangko/materai sebesar Rp. 3.291.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
5. Beban Persediaan Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp. 195.761.580,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Bahan-Bahan Lainnya tahun 2020 sebesar Rp. 75.973.470,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp. 174.682.310,00 ditambah (+) Mutasi Masuk dari bag Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 20.157.800,00 dikurangi (-) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 75.052.000,00
6. Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 246.780.720,00 sudah sesuai dengan LRA.
7. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor sebesar Rp. 54.528.650,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Perabot

- Kantor tahun 2020 sebesar Rp. 40.645.000,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp. 23.761.650,00 dikurangi (-) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 9.878.000,00.
8. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas sebesar Rp. 18.980.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
  9. Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 21.582.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
  10. Beban Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp. 673.118.875,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Natura dan Pakan-Natura tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2020 sebesar Rp. 680.977.850,00 ditambah (+) Mutasi Masuk dari bag Protokol dan TU Pimpinan sebesar Rp. 835.000,00 dikurangi (-) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 8.693.975,00.
  11. Beban Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp. 5.016.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
  12. Beban makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 1.158.316.910,00 sudah sesuai dengan LRA.
  13. Beban makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 1.158.316.910,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 1.146.441.910,00 ditambah (+) Utang belanja di tahun 2021 sebesar Rp. 11.875.000,00.
  14. Beban Pakaian Adat Daerah sebesar Rp. 57.711.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
<b>(b) Beban Jasa</b>	<b>2.529.474.057,00</b>	<b>1.742.287.936,00</b>

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.529.474.057,00 dan Rp 1.742.287.936,00.

**Tabel 3 – 34**  
**Daftar Rincian Beban Jasa**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	162.000.000,00	0,00
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	489.600.000,00	0,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	376.210.000,00	197.326.500,00
4	Beban Jasa Tenaga Supir	90.000.000,00	0,00
5	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00	0,00
6	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	6.960.920,00	4.997.520,00
8	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.810.000,00	0,00
9	Beban Tagihan Telepon	12.200.530,00	38.885.276,00
10	Beban Tagihan Air	70.356.800,00	43.059.600,00
11	Beban Tagihan Listrik	721.466.876,00	471.661.565,00
12	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.820.000,00	1.040.000,00
13	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	163.485.608,00	42.896.684,00
14	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.687.115,00	
15	Beban Lembur	182.715.000,00	95.399.000,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	64.226.520,00	38.258.390,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.274.688,00	2.857.892,00
18	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	28.580.000,00	60.360.000,00
19	Beban Jasa Konsultansi PerencanaanArsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	23.805.000,00	8.890.000,00
20	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan KonstruksiBangunan Gedung	14.275.000,00	900.000,00
21	Beban jasa pendukung kegiatan	0,00	800.000,00
22	Beban Iuran Wajib Tahunan	0,00	25.000.000,00
23	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	0,00	709.400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.529.474.057,00</b>	<b>1.742.287.936,00</b>

Rincian Beban Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp. 162.000.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
2. Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 489.600.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
3. Beban Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp. 376.210.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
4. Beban Jasa Tenaga Supir sebesar Rp. 90.000.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
5. Beban Jasa Tenaga Juru Masak sebesar Rp. 108.000.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

6. Beban Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp. 1.000.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
7. Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 6.960.920,00 sudah sesuai dengan LRA.
8. Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp. 1.810.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 1.865.000,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2020 sebesar Rp. 55.000,00.
9. Beban Telepon sebesar Rp. 12.200.530,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 12.824.300,00 ditambah (+) Utang belanja di tahun 2021 sebesar Rp. 728.175,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2020 sebesar Rp. 1.351.945,00.
10. Beban Air sebesar Rp. 70.356.800,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 70.614.200,00 ditambah (+) Utang belanja di tahun 2021 sebesar Rp. 6.024.700,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2020 sebesar Rp. 6.282.100,00.
11. Beban Listrik sebesar Rp. 721.466.876,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 712.206.818,00 ditambah (+) Utang belanja di tahun 2021 sebesar Rp. 69.943.430,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2020 sebesar Rp. 60.683.372,00
12. Beban surat kabar/majalah sebesar Rp. 2.820.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
13. Beban kawat/faksimili/internet sebesar Rp. 163.485.608,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 164.204.461,00 ditambah (+) Utang belanja di tahun 2021 sebesar Rp. 11.324.501,00 dikurangi (-) beban utang belanja tahun 2020 sebesar Rp. 12.043.354,00.
14. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp. 3.687.115,00 sudah sesuai dengan LRA.
15. Beban Lembur sebesar Rp. 182.715.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
16. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 64.226.520,00 sudah sesuai dengan LRA.
17. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 6.274.688,00 sudah sesuai dengan LRA.
18. Beban Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 28.580.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

19. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebesar Rp. 23.805.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
20. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp. 14.275.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>(c) Beban Pemeliharaan</b>	<b>1.068.690.488,00</b>	<b>1.376.442.999,00</b>

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.068.690.488,00 dan Rp 1.376.442.999,00.

**Tabel 3 – 35**  
**Daftar Rincian Beban Pemeliharaan**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	25.646.000,00	6.085.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.348.000,00	5.207.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	423.320.888,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.999.800,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.986.800,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.983.000,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.006.000,00	

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.460.000,00	11.400.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.651.000,00	
9	Beban pemeliharaan meubelair		4.806.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.175.000,00	301.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	32.236.000,00	100.324.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	505.000,00	
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.825.000,00	9.900.000,00
13	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.155.000,00	47.565.000,00
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.700.000,00	16.970.000,00
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	468.693.000,00	143.733.000,00
16	Beban pemeliharaan rumah negara golongan I	0,00	37.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.376.442.999,00</b>	<b>1.376.442.999,00</b>

1. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebesar Rp. 25.646.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
2. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebesar Rp. 3.348.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
3. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 423.320.888,00 sudah sesuai dengan LRA.
4. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 21.999.800,00 sudah sesuai dengan LRA.
5. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp. 15.986.800,00 sudah sesuai dengan LRA.
6. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 13.983.000,00 sudah sesuai dengan LRA.



7. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp. 5.006.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
8. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) sebesar Rp. 5.460.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
9. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 12.651.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
10. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebesar Rp. 2.175.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
11. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp. 32.236.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
12. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebesar Rp. 505.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
13. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 6.825.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
14. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp. 18.155.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
15. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp. 12.700.000,00 sudah sesuai dengan LRA.
16. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 468.693.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	73.212.000,00	551.004.184,00

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

**Tabel 3 – 36**  
**Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Beban Perjalanan Dinas	2021	2020
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.381.000,00	277.958.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.831.000,00	273.046.184,00
	<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>73.212.000,00</b>	<b>551.004.184,00</b>

**Tabel 3 – 37**  
**Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2021 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.381.000,00	0,00	0,00	42.381.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.831.000,00	0,00	0,00	30.831.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>73.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.212.000,00</b>

Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 42.381.000,00 00 sudah sesuai dengan LRA..
2. Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 30.831.000,00 sudah sesuai dengan LRA.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>(e) Beban lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk barang inventaris yang tidak menambah aset tetap. Beban lainnya tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

**Tabel 3 – 38**  
**Daftar Rincian Beban Lainnya**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Beban Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban meubelair	0,00	0,00
2	Beban alat dapur	0,00	0,00
3	Beban home use	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>3) Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2.728.324.436,19</b>	<b>2.144.448.304,19</b>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.728.324.436,19 dan Rp 2.144.448.304,19 sebagai berikut.

**Tabel 3 – 39**  
**Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2021 dan 2020**

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.300.379.150,77	1.944.640.673,02
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	412.309.912,92	189.876.258,67
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	15.635.372,50	9.931.372,50
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	2.728.324.436,19	2.144.448.304,19
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.728.324.436,19</b>	<b>2.144.448.304,19</b>

### 3.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>a. Ekuitas Awal</b>	<b>16.258.188.448,71</b>	<b>30.804.226.228,35</b>

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 16.258.188.448,71 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 30.804.226.228,35 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2020 *audited*.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>b. Surplus (Defisit) LO</b>	<b>(17.214.546.058,19)</b>	<b>(17.071.446.995,14)</b>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 3 – 40**  
**Surplus/Defisit LO**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO	0,00	0,00
2	Beban	17.214.546.058,19	16.388.115.832,19
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	(17.214.546.058,19)	(16.388.115.832,19)
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional		(683.331.162,95)
5	Pos Luar Biasa		
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	(17.214.546.058,19)	(17.071.446.995,14)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>c. Ekuitas Akhir</b>	<b>25.155.495.388,61</b>	<b>16.258.188.448,71</b>

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

**Tabel 3 – 41**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Bagian Umum – Sekretariat Daerah**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	16.258.188.448,71	30.804.226.228,35
2	Surplus (defisit) LO	(17.214.546.058,19)	(17.071.446.995,14)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar		2.525.964.724,50
4	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>25.155.495.388,61</b>	<b>16.258.188.448,71</b>

## 4. Informasi Non Keuangan

### 4.1. KEDUDUKAN

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan dengan di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741), maka Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sebagai penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum serta Kelompok Jabatan Fungsional dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

### 4.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN UMUM

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya, Bagian Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

#### A. TUGAS POKOK

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.

#### B. FUNGSI

1. Penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan perencanaan, dan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan;
2. Penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan;

3. Pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
5. Pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/ atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

#### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf b angka 1, angka 2 huruf b), huruf c angka 1, angka 2 huruf b) dan angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
3. Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
4. Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 89 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Desember  
2021

KEADAAN : 03/01/2022

## STRUKTUR BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN LUMAJANG

### KEPALA BAGIAN

SUBECHAN, SE, MM  
NIP. 19710808 199203 1 007

### FUNGSIONAL

LILIEK INDRAJATI, A.Md  
NIP. 19650102 199003 2 003

### FUNGSIONAL

MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I  
NIP. 19830228 201402 1 001

### PELAKSANA

1. M. MARIA SUDARTI.
2. SRI HANDAYANI
3. IKA SEPTI DAMAYANTI
4. IMAM KHANAFI

### PELAKSANA

1. NANING FITRIYATI KHOMARIYAH
2. KARU
3. AHMAD BAIDOWI

### PELAKSANA

1. ARIF BUDI SANTOSO
2. BUDI
3. SALE
4. JAILANI
5. MAHFUD SHIDIQ
6. AGUS PRIJA HARJANA
7. KASNAN
8. SUHARTONO
9. SLAMET
10. MUNIR
11. FATCHUR ROHMAN
12. SUGIRI
13. SUMAYAR
14. SUPRIYANTO
15. HADI SARWONO

### 4.3. LAIN – LAIN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang dibantu oleh perangkat pemerintah terdiri dari :

#### A. Status Kepegawaian

a. Pegawai Negeri Sipil	( PNS )	: 25 orang
b. Calon Pegawai Negeri Sipil		: - orang
c. Tenaga Kontrak SK Bupati		: - orang
d. Tenaga Kontrak Bagian Umum		: 53 orang

#### B. Latar belakang Pendidikan

a. Magister	( S2 )	: 6 orang
b. Sarjana	( S1 )	: 4 orang
c. Sarjana Muda /diploma III	( D3 )	: 1 orang
d. Sarjana Muda /diploma II	( D2 )	: - orang
e. Sarjana Muda /diploma I	( D1 )	: - orang
f. SLTA		: 13 orang
g. SLTP		: 6 orang
h. SD		: 2 orang

#### C. Pangkat dan Golongan

a. Pembina Utama Madya	( IV/d )	: - orang
b. Pembina Utama Muda	( IV/c )	: 6 orang
c. Pembina Tingkat I	( IV/b )	: 1 orang
d. Pembina	( IV/a )	: - orang
e. Penata Tingkat I	( III/d )	: 2 orang
f. Penata	( III/c )	: 1 orang
g. Penata Muda Tingkat I	( III/b )	: 1 orang
h. Penata Muda	( III/a )	: 2 orang
i. Pengatur Tingkat I	( II/d )	: - orang
j. Pengatur	( II/c )	: 4 orang
k. Pengatur Muda Tingkat I	( II/b )	: 3 orang
l. Pengatur Muda	( II/a )	: 6 orang
m. Juru Tingkat I	( I/d )	: 5 orang
n. Juru	( I/c )	: 1 orang



- o. Juru Muda Tingkat I ( I/b ) : - orang
- p. Juru Muda ( I/a ) : - orang
- D. Pejabat Struktural dan Fungsional
  - a. Struktural ( Eselon II,III,dan IV ) : 8 Orang
  - b. Pelaksana : 22 Orang
  - c. Fungsional : 2 Orang

## 5. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Bagian Umum – Sekretariat Daerah tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Bagian Umum – Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
  - ≡ Menyediakan informasi mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Umum – Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - ≡ Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Bagian Umum – Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
  - ≡ Menyediakan informasi mengenai kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Bagian Umum – Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca;
  - ≡ Menyediakan informasi mengenai data semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Bagian Umum – Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Laporan keuangan pokok Bagian Umum – Sekretariat Daerah, Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD, Laporan Operasional yang menginformasikan pendapatan dan beban operasional, Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset dan ekuitas Bagian Umum – Sekretariat Daerah pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Perubahan Ekuitas yang menginformasikan perkembangan ekuitas hingga periode laporan serta

Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

4. Dari Laporan Realisasi Anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :
  - ≡ Dari anggaran belanja sebesar Rp. 16.222.673.028,00 terealisasi sebesar Rp. 15.661.408.529,00 atau 96,54 dari anggaran.
5. Dari Laporan Operasional diperoleh informasi sebagai berikut:
  - ≡ Beban operasional Bagian Umum - Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. (17.214.546.058,19).
  - ≡ Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2021 sebesar Rp. (0,00)
  - ≡ Surplus/Defisit dari operasional Bagian Umum - Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. (17.214.546.058,19).
  - ≡ Dari Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh informasi sebagai berikut:
  - ≡ Ekuitas awal yang berasal dari tahun 2020 sebesar Rp. 16.258.188.448,71.
  - ≡ Ekuitas akhir Bagian Umum – Sekretariat Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 25.155.495.388,61.
6. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :
  - ≡ Total aset Bagian Umum – Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.961.910.859,61.
  - ≡ Total kewajiban Bagian Umum – Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 353.740.365,00.
  - ≡ Total ekuitas atau kekayaan bersih Bagian Umum – Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 25.155.495.388,61.